

- Tersedia Format Naskah Kerja Sama sesuai jenis Kerja Sama yang akan dilaksanakan

III. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU 2023	REALISASI			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	358.199.000	64.746.000			
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					
		Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	51.425.500	31.625.000			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	161.852.500	5.825.000			
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	144.921.000	27.296.000			
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	25.558.800	2.730.000			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					

Realisasi anggaran Kegiatan Administrasi Pemerintah dan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan pagu Rp. 383.757.800 telah terealisasi Rp. 67.476.000 atau mencapai 17,58%.

IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kinerja bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar triwulan I tahun 2023 seluruhnya tercapai dengan baik sesuai target, dari faktor-faktor penghambat yang disampaikan maka disimpulkan dan ditindaklanjuti antara lain :

1. Pada Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah telah diselesaikan 4 dokumen yaitu Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022, Dokumen Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Tahun 2022, Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022, dan Dokumen Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022.
2. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022 telah diserahkan pada tanggal 27 April 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. Penyampaian LKPJ Tahun 2022 dijadwalkan pada Sidang Paripurna tanggal 29 April 2023, namun dikarenakan tidak memenuhi kuorum sehingga penyampaian LKPJ 2022 ditunda hingga tanggal 5 April 2023.
3. Nilai LPPD Tahun 2021 dan 2022 belum dikeluarkan oleh Kemendagri.
4. Hanya ada beberapa kecamatan yang mengumpulkan Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam, masih banyak kecamatan yang masih belum menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam setiap bulannya. Sebagai tindak lanjut, telah disampaikan surat penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam sehingga menjadi perhatian Camat agar menyampaikan secara rutin setiap bulannya sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
5. Beberapa kecamatan yang wilayahnya jauh dari kabupaten dan kecamatan yang memiliki kualitas jaringan internet kurang baik terkendala pada pengumpulan Laporan PATEN bulanan.
6. Pada Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dalam penyusunan Dokumen Profil Kecamatan banyak menggunakan data dari luar seperti data dari BPS dan Dinas/Badan terkait sehingga penyusunan menunggu data resmi yang dikeluarkan.

Dengan capaian kinerja ini akan menjadi patokan untuk pencapaian kinerja selanjutnya di triwulan berikutnya, diharapkan upaya dan kerjasama dari semua pihak baik pemangku kinerja maupun pendukung lainnya dapat bekerjasama dengan lebih baik agar kinerja yang telah ditargetkan dapat tercapai.

V. SARAN DARI ATASAN

Demikian disampaikan kinerja Bagian Pemerintahan, Mohon arahan sebagai bahan selanjutnya

- Realisasi Capaian Kinerja pada II.a, perlu diieri capaian TW 1 di dalam materinya, sesuai uraian & bawahnya

A 4/5 2023

Analisis Kebijakan Muda

DEVY SILVANA EKASARI, SH
NIP. 198212262010012030

D/S

M. SUPRIANSYAH, S.ST, M.Sos
NIP. 198309142009011001

FEBRI KUSUMA ATMA DEWI S.STP
NIP. 199502082016092001



Mengetahui,
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat



Drs. H. MASRURI, MM
NIP. 196405131990031007

Martapura, April 2023
Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah


ARI MAULUDDIN AKBAR, S.Sos, M.Si
NIP.197005291990031005

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) IKU
- 3) Surat Pernyataan

Sehingga Kabupaten Banjar tidak dapat memenuhi target penyampaian LKPJ pada sidang paripurna paling lambat 31 Maret

Faktor Pendukung :

- Rapat Asistensi Penyusunan LPPD, SPM dan LKPJ, selain dihadiri Sub Bagian Perencanaan juga dihadiri Bidang-Bidang Teknis sehingga mempermudah pengumpulan data dukung.
- Seluruh data dukung LPPD, SPM dan LKPJ diwajibkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi Srikandi sehingga mempercepat proses tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pada setiap data dukung.
- Beberapa Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan sudah selaras dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sehingga mempermudah dalam menyajikan data dukung
- Tim Pereviu membahas langsung dengan tim penyusun, ketika ditemukan data IKK yang belum sesuai, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sebelum CHR dikeluarkan
- Tim Penyusun bersama dengan Tim Pereviu melakukan desk untuk membahas Catatan Hasil Reviu (CHR) LPPD dengan Perangkat Daerah yang mendapat catatan untuk perbaikan.

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 Target : 1 Dokumen
 Realisasi Kinerja : 0 Dokumen
 Realisasi Fisik : 29%
 Realisasi Keuangan : 2.730.000

Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan :

- Membuat Register Progres Kerja Sama Tahun 2023
- Menyusun Draf SK Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
- Meregister dan Memeriksa Kelengkapan Usulan Kerja Sama
- Melaksanakan Rapat Fasilitasi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
- Membuat Nota Pengantar Contract Drafting ke Bagian Hukum
- Mencetak Naskah Kerja Sama - Mengkompilasi Naskah Kerja Sama Daerah Tahun 2022
- Menerima Konsultasi tentang Kerja Sama Daerah dari Perangkat Daerah
- Koordinasi tentang Kerja Sama Daerah dengan Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Kalsel
- Menyusun Notulensi Hasil Rapat TKKSD

Faktor Penghambat :

- Beberapa Perangkat Daerah belum memahami prosedur Kerja Sama Daerah
- Belum ada pemetaan kerja sama daerah sehingga kerja sama bersifat spontan dan tidak terencana
- Beberapa perangkat daerah ingin langsung meminta nomor register kerja sama dan penandatanganan sedangkan belum dirapatkan oleh TKKS

Faktor Pendukung :

- Beberapa Perangkat Daerah telah memahami prosedur Kerja Sama Daerah
- Kehadiran Anggota tetap Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam setiap rapat pembahasan Naskah Kerja Sama Daerah

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
 BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANJAR**

I. PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023, target kinerja bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100%	358.199.000
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	
		Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dok	51.425.500
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dok	161.852.500
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dok	144.921.000
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100%	25.558.800
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	25.558.800

II. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar atas sasaran, program dan kegiatan dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis singkat sebagai berikut:

a. Realisasi kinerja kegiatan, dengan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan	100%				
		Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%				
		Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi	100%				

		Pelaksanaan Otonomi Daerah					
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah Dengan Pihak Terkait Yang Ditindaklanjuti	100%				

- Kegiatan** : **Administrasi Pemerintahan**
- Indikator Kegiatan** : Persentase Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan
- Target** : 100%
- Realisasi** : **25%**
- Faktor Penghambat** :
- Banyak kecamatan yang belum membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam
 - Nama rekening pembayaran iuran APKASI berbeda dengan yang tertera dalam surat yang diedarkan sehingga proses pembayaran tersebut gagal.
 - Pada tahun-tahun sebelumnya Biro Organisasi Prov. Kalsel memberikan bukti pembayaran iuran Keanggotaan APKASI. Namun, pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Biro Organisasi Prov. Kalsel tidak mengeluarkan bukti pembayaran tersebut sehingga menunggu bukti pembayaran iuran keanggotaan APKASI dari Sekretariat APKASI di Jakarta.
 - Pengiriman bukti pembayaran iuran keanggotaan APKASI tahun 2023 dari Pengurus APKASI Pusat dikirimkan melalui ekspedisi sehingga memerlukan waktu untuk diterima.
- Faktor Pendukung** :
- Format Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam sudah disampaikan kepada kecamatan
 - Kecamatan sudah melaksanakan Kegiatan Seperti Rapat Koordinasi Forkopimcam
 - Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar berkoordinasi dengan Pengurus APKASI Pusat terkait nama rekening untuk pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahun 2023 dan kegagalan pembayaran tersebut.
 - Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar langsung melakukan pembayaran iuran keanggotaan APKASI kembali setelah konfirmasi pembayaran yang gagal dari Pengurus APKASI Pusat.
 - Pengurus APKASI Pusat akan mengirimkan bukti pembayaran iuran keanggotaan APKASI Tahun 2023.
- Kegiatan** : **Administrasi Pemerintahan**
- Indikator Kegiatan** : Persentase Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Target** : 100%
- Realisasi** : **25%**
- Faktor Penghambat** :
- Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan / Uang Persediaan (UP) belum tersedia
 - Padatnya aktivitas diawal tahun dalam menyiapkan laporan
 - Kesulitan dalam membuat surat kontrak untuk pembuatan SPJ makan minum melalui E-Katalog

- Padatnya kegiatan yang melibatkan bagian pemerintahan dalam menghadiri kegiatan musrenbang ke kecamatan se-kabupaten banjar
 - Minimnya data / dokumen batas dalam fasilitasi batas kecamatan
 - Belum adanya batas desa yg definitive sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas wilayah
 - Minimnya SDM yang menguasai ilmu pemetaan
 - Minimnya dokumen terkait batas wilayah
- Faktor Pendukung :
- Adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyelesaikan permasalahan
 - Arahan dari pimpinan untuk penyelesaian masalah
 - Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data
-
- Kegiatan** : **Administrasi Pemerintahan**
- Indikator Kegiatan : Persentase Fasilitasi, Koordinasi, dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Target : 100%
- Realisasi : 80%
- Faktor Penghambat :
- Terjadi keterlambatan penyampaian Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terjadi perbedaan definisi operasional untuk beberapa urusan pemerintahan.
 - Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD belum selaras dengan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sehingga ada beberapa IKK yang nilainya 0 dikarenakan tidak ada Kegiatan yang mendukung capaian IKK.
 - Perangkat Daerah terlambat mengumpulkan Data Dukung sehingga menghambat proses rewiu dari inspektorat
 - Terjadi perbedaan persepsi antara Perangkat Daerah dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD. - Beberapa data belum bisa diperoleh untuk melengkapi dokumen LPPD seperti Data Capaian Makro yang bersumber dari BPS Kabupaten Banjar, Realisasi Keuangan, dan Dokumen LKjIP.
 - LKPJ telah disampaikan ke DPRD dan dijadwalkan untuk sidang paripurna tanggal 29 Maret 2023, namun dikarenakan tidak kuorum pada saat sidang paripurna, penyampaian LKPJ pada sidang paripurna DPRD ditunda ke tanggal 5 April 2023. Sehingga Kabupaten Banjar tidak dapat memenuhi target penyampaian LKPJ pada sidang paripurna paling lambat 31 Maret.
- Faktor Pendukung :
- Rapat Asistensi Penyusunan LPPD, SPM dan LKPJ, selain dihadiri Sub Bagian Perencanaan juga dihadiri Bidang-Bidang Teknis sehingga mempermudah pengumpulan data dukung.
 - Seluruh data dukung LPPD, SPM dan LKPJ diwajibkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik

melalui Aplikasi Srikandi sehingga mempercepat proses tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pada setiap data dukung.

- Beberapa Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan sudah selaras dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sehingga mempermudah dalam menyajikan data dukung
- Tim Pereviu membahas langsung dengan tim penyusun, ketika ditemukan data IKK yang belum sesuai, sehingga dapat segera ditindaklanjuti sebelum CHR dikeluarkan - Tim Penyusun bersama dengan Tim Pereviu melakukan desk untuk membahas Catatan Hasil Reviu (CHR) LPPD dengan Perangkat Daerah yang mendapat catatan untuk perbaikan

Kegiatan	: Fasilitasi Kerjasama Daerah
Indikator Kegiatan	: Persentase Pemenuhan Kriteria Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang baik
Target	: 100%
Realisasi	: 25%
Faktor Penghambat	: <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Perangkat Daerah belum memahami prosedur Kerja Sama Daerah • Belum ada pemetaan kerja sama daerah sehingga kerja sama bersifat spontan dan tidak terencana • Beberapa perangkat daerah ingin langsung meminta nomor register kerja sama dan penandatanganan sedangkan belum dirapatkan oleh TKKSD
Faktor Pendukung	: <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Perangkat Daerah telah memahami prosedur Kerja Sama Daerah • Kehadiran Anggota tetap Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam setiap rapat pembahasan Naskah Kerja Sama Daerah • Tersedia Format Naskah Kerja Sama sesuai jenis Kerja Sama yang akan dilaksanakan

b. Realisasi kinerja sub kegiatan, dengan capaian sebagai berikut :

NO	SASARAN/PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dok	0 Dok			
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dok	0 Dok			
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dok	4 Dok			

4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dok	0 Dok			
---	------------------------------------	---	-------	-------	--	--	--

Sub Kegiatan : **Penataan Administrasi Pemerintahan**
Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan
Target : 4 Dokumen
Realisasi Kinerja : 0 Dokumen
Realisasi Fisik : 79,13 %
Realisasi Keuangan : 31.625.000

Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan :

- Menyusun Rencana Kerja Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
- Membuat Telaahan Staf Perihal Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan
- Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan
- Melaksanakan Rapat Internal Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bulan Januari 2023
- Menghimpun Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) bulan Januari 2023 dari kecamatan
- Membuat Telaahan Staf Pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahun 2023
- Melaksanakan Fasilitasi Berupa Rapat Koordinasi Pesiapan Pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Set Top Box (STB) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Lembaga Penyiaran Swasta Penyelenggara Multipleksing di 3 Wilayah Layanan Siaran
- Melaksanakan Rapat Internal Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bulan Februari 2023
- Melaksanakan pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahun 2023.
- Melaksanakan Rapat Internal Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar bulan Maret 2023

Faktor Penghambat :

- Banyak kecamatan yang belum membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam
- Nama rekening pembayaran iuran APKASI berbeda dengan yang tertera dalam surat yang diedarkan sehingga proses pembayaran tersebut gagal.
- Pada tahun-tahun sebelumnya Biro Organisasi Prov. Kalsel memberikan bukti pembayaran iuran Keanggotaan APKASI. Namun, pada tahun 2023 Biro Organisasi Prov. Kalsel tidak mengeluarkan bukti pembayaran tersebut.
- Pengiriman bukti pembayaran iuran keanggotaan APKASI tahun 2023 dari Pengurus APKASI Pusat dikirimkan melalui ekspedisi sehingga memerlukan waktu untuk diterima.

Faktor Pendukung :

- Format Laporan Pelaksanaan Tugas Forkopimcam sudah disampaikan kepada kecamatan
- Kecamatan sudah melaksanakan Kegiatan Seperti Rapat Koordinasi Forkopimcam
- Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar berkoordinasi dengan Pengurus APKASI Pusat terkait nama rekening untuk pembayaran iuran Keanggotaan APKASI Tahun 2023 dan kegagalan pembayaran tersebut.

- Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banjar langsung melakukan pembayaran iuran keanggotaan APKASI kembali setelah konfirmasi pembayaran yang gagal dari Pengurus APKASI Pusat.
- Pengurus APKASI Pusat akan mengirimkan bukti pembayaran iuran keanggotaan APKASI Tahun 2023.

Sub Kegiatan	: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Target	: 4 Dokumen
Realisasi Kinerja	: 0 Dokumen
Realisasi Fisik	: 18,69%
Realisasi Keuangan	: 5.825.000

Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan :

- Membuat kerangka acuan kerja
- Membuat jadwal kegiatan
- Menerima surat permohonan fasilitasi batas kecamatan
- Menerima konsultasi dari warga terkait informasi batas wilayah
- Menerima Konsultasi dari Kecamatan terkait sengketa tanah
- Membuat telaahan staf pelaksanaan kegiatan
- Membuat Telaahan Staf Kegiatan
- Menghadiri Kegiatan Musrenbang utk memberikan materi SPM
- Melaksanakan Rapat Persiapan Batas Kecamatan
- Melaksanakan Penelusuran/Pelacakan Batas wilayah
- Mengikuti Bimtek Toponimi di Setda Provinsi Kalsel
- Melaksanakan rapat fasilitasi sengketa tanah di Kecamatan Simpang Empat
- Melaksanakan rapat Pembinaan Kecamatan terkait anggaran Kecamatan
- Menyiapkan surat informasi batas wilayah
- Menerima surat kode wilayah dari Mendagri dan menyampaikannya kepada kecamatan
- Menghadiri Rapat Permasalahan Sengketa tanah Di Kanwil BPN Kalsel
- Melaksanakan Rapat Fasilitasi Pembinaan Kecamatan terkait rencana formulasi anggaran Kecamatan
- Mengikuti dan menghadiri Rakor PPBDes di Dinas DPMD Provinsi Kalsel.
- Melaksanakan Rapat Fasilitasi Batas Kecamatan Tatah Makmur dengan Kecamatan Kertak Hanyar.
- Mengikuti dan menjadi narasumber pada workshop penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh DPMD Kab.Banjar

Faktor Penghambat :

- Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan / Uang Persediaan (UP) belum tersedia
- Padatnya aktivitas diawal tahun dalam menyiapkan laporan
- Kesulitan dalam membuat surat kontrak untuk pembuatan SPJ makan minum melalui E-Katalog
- Padatnya kegiatan yang melibatkan bagian pemerintahan dalam menghadiri kegiatan musrenbang ke kecamatan se-kabupaten banjar
- Minimnya data / dokumen batas dalam fasilitasi batas kecamatan
- Belum adanya batas desa yg definitive sehingga menimbulkan ketidakjelasan batas wilayah - Minimnya SDM yang menguasai ilmu pemetaan
- Minimnya dokumen terkait batas wilayah

Faktor Pendukung :

- Adanya koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyelesaikan permasalahan
- Arahan dari pimpinan untuk penyelesaian masalah
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk pengumpulan data

Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Indikator Kinerja	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Target	: 5 Dokumen
Realisasi Kinerja	: 4 Dokumen
Realisasi Fisik	: 80%
Realisasi Keuangan	: 27.296.000

Tahapan Pekerjaan yang sudah dilakukan :

- Menyusun SK Bupati tentang Tim Penyusun LPPD dan LKPJ.
- Melaksanakan Rapat Asistensi Penyusunan LPPD, SPM dan LKPJ kepada 27 Perangkat Daerah.
- Melakukan Pendampingan Penyusunan LPPD, SPM dan LKPJ kepada 27 Perangkat Daerah
- Melakukan Pengumpulan Data dan Bahan Penyusunan LPPD, SPM dan LKPJ
- Melakukan Sosialisasi SPM pada Acara Musrenbang Kecamatan.
- Melakukan penginputan data capaian SPM Triwulan IV pada aplikasi e-SPM Bangsa Kemendagri
- Mengisi Template IKK LPPD dan Penyusunan Narasi LPPD, SPM dan LKPJ
- Koordinasi Hasil Reviu Sementara dari Tim Pereviu (APIP)
- Penyampaian Hasil Reviu Inspektorat terhadap LPPD
- Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ, dan SPM
- Penginputan IKK pada Aplikasi SILPPD
- Pencetakan Dokumen LPPD, RLPPD, SPM dan LKPJ

Faktor Penghambat :

- Terjadi keterlambatan penyampaian Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2022 dari Kementerian Dalam Negeri sehingga terjadi perbedaan definisi operasional untuk beberapa urusan pemerintahan.
- Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD belum selaras dengan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sehingga ada beberapa IKK yang nilainya 0 dikarenakan tidak ada Kegiatan yang mendukung capaian IKK.
- Perangkat Daerah terlambat mengumpulkan Data Dukung sehingga menghambat proses reviu dari inspektorat
- Terjadi perbedaan persepsi antara Perangkat Daerah dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD.
- Beberapa data belum bisa diperoleh untuk melengkapi dokumen LPPD seperti Data Capaian Makro yang bersumber dari BPS Kabupaten Banjar, Realisasi Keuangan, dan Dokumen LKjIP.
- LKPJ telah disampaikan ke DPRD dan dijadwalkan untuk sidang paripurna tanggal 29 Maret 2023, namun dikarenakan tidak kuorum pada saat sidang paripurna, penyampaian LKPJ pada sidang paripurna DPRD ditunda ke tanggal 5 April 2023.